

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011-2020

Cindy Elik Fajriati¹, Engkus², Husen Saeful Anwar³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: cindyelik@gmail.com

engkus@uinsgd.ac.id

husensaefulanwar@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu mengalokasikan anggaran 30% untuk belanja modal dimana tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengalokasikan anggaran belanja daerahnya secara maksimal ke dalam belanja modal yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja daerah terhadap alokasi belanja modal serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampel yang digunakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi belanja daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikan hasil uji masing-masing adalah 0.478 dan 0.395, serta kinerja keuangan berupa rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan nilai signifikansi 0.498.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Daerah, Efektivitas; Efisiensi, Belanja Modal*

ABSTRACT

The problem in this study is that the provincial government of DKI Jakarta has not allocated a budget of 30% for capital expenditure which is not in accordance with established regulations so that it can be interpreted that the provincial government of DKI Jakarta allocates its regional budget maximally for capital expenditures that are directly related to the public interest. The purpose of this

study was to determine the effect of regional financial performance which consists of the effectiveness ratio of regional original income and the efficiency ratio of regional expenditures to the allocation of capital expenditures and to find out how big the effect is. The research approach used in this research is a quantitative approach. The population in this study is the Provincial Government of DKI Jakarta. The sample used is the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province. The data collection technique used is a documentation study. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that the effect of regional financial performance in the form of the effectiveness ratio of regional original income and efficiency ratio of regional expenditure partially had no effect on the allocation of capital expenditures with a significant value of the test results respectively 0.478 and 0.395, as well as the financial performance of the effectiveness ratio of regional original income and efficiency. Simultaneous regional expenditures have no effect on the allocation of capital expenditures with a significance value of 0.498.

Keywords: *Regional Financial Performance, Effectiveness, Efficiency, Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Bentuk pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah telah mengalami perubahan bentuk dari bentuk pemerintahan yang tersentralisasi menjadi bentuk pemerintahan yang terdesentralisasi. Bentuk pemerintahan daerah tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi dalam suatu negara melibatkan pemindahan wewenang dari orang lain yang lebih dekat pada masyarakat untuk melaksanakan layanan publik tertentu (Engkus, 2013). Laksmi & Supadmi (2014) mengatakan bahwa desentralisasi bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, transparan serta akuntabel kepada publik atau masyarakat. Dalam menjalankan desentralisasi fiskal, salah satu prinsip yang wajib diperhatikan serta dilaksanakan adalah prinsip *rules money should follow function*, dapat dikatakan bahwa setiap penyerahan kekuasaan pemerintahan memiliki konsekuensi terhadap anggaran yang diperlukan untuk menjalankan wewenang tersebut. Menurut (Hidayat, 2013) pemerintah daerah diharuskan untuk kreatif serta inovatif dalam menyusun anggaran karena akan ada masalah penganggaran terutama dalam pengalokasian terkait sumber daya yang menjadi kepunyaan setiap daerah. Pemerintah daerah diharuskan untuk mengalokasikan anggaran untuk belanja yang produktif dikarenakan

sumber daya yang dimiliki terbatas. Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa bagi pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikatakan sebagai kerangka ataupun rencana pembangunan daerah. APBD memainkan peran penting dalam keadilan, penyaluran, serta penstabilan keuangan publik daerah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan APBD karena dapat menunjukkan orientasi pembangunan daerah.

Kemajuan suatu daerah dapat dicapai dengan menaikan kesejahteraan publik melalui pengelolaan keuangan yang baik (Engkus, 2018). Menurut Halim (2012) dalam (Lubis, 2017) kinerja keuangan daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Teknik analisis laporan keuangan merupakan cara untuk melihat bagaimana kinerja keuangan yang mana sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Mahmudi, 2016) bahwa sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, politik ataupun sosial laporan keuangan perlu dianalisis sehingga menunjukkan gambaran kinerja keuangan.

Halim dalam (Mulyani, 2017) menyatakan bahwa indikator keberhasilan dari suatu daerah itu bisa dilihat dari kinerja keuangan daerahnya yakni salah satunya dari efektivitas pemungutan PAD dan efisiensi belanja daerah. Eskalasi pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pengelolaan kinerja keuangan daerah yang baik. Meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan publik dapat dicapai ketika pemerintah daerah menggunakan lebih banyak pendapatan daerah untuk alokasi belanja modal (Riswan & Affandi, 2014).

Dalam melakukan alokasi belanja modal dibutuhkan manajemen keuangan yang teratur supaya mendapatkan hasil yang berdaya guna, oleh sebab itu dibutuhkan kemampuan keuangan

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang baik sehingga menjadi jelas seberapa besar keberhasilan yang telah dicapai (Yulientinah & Nur, 2021). Rasio belanja modal terhadap belanja daerah tercermin dalam sebuah porsi belanja (Lempoy, 2020). Pada dasarnya, alokasi anggaran terhadap bagian-bagian belanja modal berfungsi memenuhi keperluan publik akan adanya fasilitas dan infrastruktur umum. Namun, kepentingan politik legislatif dalam kaitannya dengan proses rancangan anggaran menimbulkan alokasi belanja modal sering kali tidak berhasil dalam merampungkan persoalan di tengah masyarakat (Abdullah, 2012). Selain faktor kepentingan politik, ada banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan alokasi untuk belanja daerah seperti halnya faktor dari kemampuan keuangan daerah serta perilaku oportunistik dari para pejabat (Hidayat, 2013). Dari beberapa faktor

tersebut, faktor keuangan daerahlah yang dapat diukur secara empiris (Lempoy, 2020).

Fenomena permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Provinsi DKI Jakarta untuk alokasi belanja modal yang memiliki pengaruh langsung terhadap kebutuhan publik nilainya masih rendah serta tidak sesuai dengan peraturan. Menurut Direktorat (Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012) selama tahun 2010 sampai 2012 nilai belanja modal pemerintah daerah di Indonesia

tidak mencapai 30% dari total belanja daerahnya. Kemudian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013. "Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja modal sekurang-kurangnya 29% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014". Lalu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014 bahwa kebijakan alokasi belanja modal harus memenuhi sekurang-kurangnya 30% dari total belanja daerah. Kemudian pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019, pemerintah daerah diamanatkan untuk mengalokasikan belanja modal dalam APBD minimal

30% dari total belanja daerah. Namun pada kenyataannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggarannya sebesar 30% untuk belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 :

**Tabel. 1 Belanja Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-
2020**

Tahun	Belanja	Total	(%)
Anggar- an	Modal (dalam triliun rupiah)	Belanja Daerah (dalam triliun rupiah)	Belanja Modal
2011	7.31	26.42	27.68%
2012	8.78	31.55	27.83%
2013	10.69	38.30	27.92%
2014	10.41	37.79	27.54%
2015	10.24	42.66	24.01%
2016	8.96	46.91	19.10%
2017	11.04	50.72	21.77%
2018	14.11	61.06	23.12%
2019	11.55	64.09	18.02%
2020	3.17	51.71	6.13%
		Rata- rata	19.91%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021
 (diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2020 pemerintah DKI Jakarta belum mampu mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal sebesar 30%. Bahkan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan tren yang menurun dan fluktuatif. .

Penelitian terdahulu (Hidayat, 2013) dengan berjudul "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

(Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)”, kinerja keuangan ditentukan oleh efektivitas PAD tahun lalu, tingkat pendanaan SiLPA tahun lalu dan rasio ruang fiskal tahun lalu. Regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya yaitu kinerja keuangan daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun selanjutnya. Kemudian tingkat ketergantungan tahun lalu berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap alokasi belanja modal tahun selanjutnya. Lalu, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya, pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta rasio ruang fiskal tahun sebelumnya, masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap alokasi belanja modal tahun selanjutnya. Perbedaan atau noveltynya yaitu pada teknik analisis data yang digunakan, indikator kinerja keuangan dan obyek yang diteliti.

Penelitian yang lain (Andriyani N et al., 2020) dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014-2018)”. Regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) menggunakan E-View 8 merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya yaitu kinerja keuangan

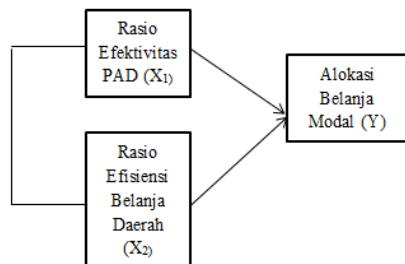
daerah terhadap alokasi belanja modal memiliki pengaruh secara signifikan. Kemudian rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi secara parsial memiliki pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan rasio desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Perbedaan atau noveltynya yaitu pada teknik analisis data yang digunakan, dan obyek yang diteliti.

Penelitian yang lain (Yulientinah & Nur, 2021) dengan Judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten/Kota Bulukumba”. Pengujian normalitas, data, analisis. Korelasi product moment, analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi, dan uji t dengan menggunakan SPSS versi 25.0 merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan. Perbedaan atau noveltynya yaitu pada teknik analisis data yang digunakan, dan obyek yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kinerja keuangan daerah dalam rasio efektivitas daerah, dan rasio efisiensi belanja daerah terhadap alokasi belanja modal serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya.

Adapun kerangka penelitiannya yaitu sebagai berikut :

Gambar. 1 Kerangka Penelitian



Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 = Terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y**
- H2 = Terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y**
- H3 = Terdapat pengaruh secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2020”.

KAJIAN PUSTAKA

Halim (2003) dalam (Mulyani, 2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator keberhasilan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari efektivitas pemungutan PAD dan efisiensi belanja daerah. keuangan daerah yang baik akan mengarah pada eskalasi pelayanan serta kesejahteraan publik.

Meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan publik dapat dicapai ketika pemerintah daerah menggunakan lebih besar pendapatan daerahnya untuk alokasi belanja modal (Riswan & Affandi, 2014).

Kinerja keuangan yaitu hasil pencapaian kerja dengan menggunakan indikator keuangan dalam bidang keuangan daerah yang ditentukan oleh kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan keuangan daerah (Siregar & Mariana, 2020).

Efektivitas pemungutan PAD yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya (Lau dan Syahriandi, 2016). Efisiensi belanja daerah yaitu membandingkan antara realisasi atau pelaksanaan belanja dengan anggaran, maka dapat diketahui tingkat penghematan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Fathiyah, 2012).

Alokasi belanja modal yaitu penyaluran anggaran untuk mendapatkan asset tetap atau asset lainnya yang mempunyai periode fungsi satu tahun lebih periode akuntansi (Yulientinah dan Nur, 2021). Belanja modal peralatan, belanja mesin, belanja tanah, belanja modal, jalan irigasi, belanja gedung dan bangunan merupakan belanja modal (Mumuh et al, 2020). Tujuan pembangunan aset tetap berupa sarana dan prasarana adalah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai guna menaikkan

produktivitas ekonomi. (Abdullah, 2012).

Rendahnya nilai belanja modal pemerintah daerah menimbulkan persoalan tentang bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah mempengaruhi perilaku belanja pemerintah daerah terkhusus belanja modal untuk pelayanan masyarakat atau publik (Halim, 2002) dalam (Riswan dan Affandi, 2014)

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Tempat yang diambil dalam penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada November 2021 sampai Mei 2022. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi DKI Jakarta tahun 2011-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Data didapatkan dari website resmi milik pemerintah provinsi DKI Jakarta yaitu <https://ppid.jakarta.go.id/>. Instrumen penelitian yang diperlukan yaitu pedoman dokumentasi yang terdiri dari LRA Provinsi DKI Jakarta tahun 2011-2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Rasio Efektivitas PAD

Jenis rasio ini memfokuskan kepada kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai PAD/sesuai dengan target yang direncanakan. Target ini didasarkan dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan sebenarnya dari masing-masing daerah. Berikut rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel. 2 Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas PAD	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber : Mahmudi (2016) dalam (Farida & Nugraha, 2019)

Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan jumlah pendapatan yang diterima. Dikatan sangat efisien jika rasio efisiensi semakin kecil dan sebaliknya. Berikut rumus untuk menghitung rasio efisiensi belanja daerah :

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel. 3 Tingkat Efisiensi Belanja Daerah

Efisiensi	Persentase Efisiensi
Belanja Daerah	(%)
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup Efisien	80%-90%
Kurang Efisien	90%-100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber : (Wahyuddin & Sugianal, 2017)

Uji Asumsi Klasik

Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov akan digunakan pada penelitian ini dengan nilai signifikan 0,05. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan normal (Ayuwardani & Isroah, 2018).

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali & (2011) dalam (Ayuwardani & Isroah, 2018) uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dari model regresi. Model regresi yang baik yaitu tidak adanya multikolinearitas. Dasar pengambilannya adalah jika nilai VIF <10 berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini digunakan uji heteroskedastisitas dengan metode grafik scatterplot. Asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidak samaan varian pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusan ini adalah

dikatakan terdapat heteroskedastisitas jika terdapat titik-titik yang membentuk pola teratur, tetapi sebaliknya dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik tersebut tidak membentuk pola tertentu serta titik-titik tersebut menyebar diatas dan bawah dari angka 0 sumbu Y (Santoso, 2012 dalam (Syuhabudin, 2021)).

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi linier untuk setiap korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Apabila terjadi autokorelasi maka dikatakan ada masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini, ada tidaknya autokorelasi diuji menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Tidak terdapat autokorelasi jika $(4-DW) > \text{Durbin Upper (DU)} < DW$ (Ayuwardani & Isroah, 2018).

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda untuk memprediksi keadaan variabel dependen jika dua atau ditambah variabel independen membuat prediksi (kenaikan nilai) (Satria, 2021).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = Alokasi Belanja Modal
 α = Konstanta
 X1 = Rasio Efektivitas PAD
 $\beta_{1,2}$ = Koefisien Regresi
 X2 = Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Uji Hipotesis Uji Statistik t

Kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu di katakan terdapat pengaruh jika $t_{hitung} > t_{tabel}$; signifikansi $< 0,05$, sebaliknya di katakan tidak terdapat pengaruh jika $t_{hitung} < t_{tabel}$; signifikansi $> 0,05$ (Rahmawati & Illiyin, 2021).

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Dikatakan terdapat pengaruh secara=simultan antara variabel bebas dan variabel terikat jika $F_{hitung} > F_{tabel}$; signifikansi $< 0,05$. Namun, dikatakan tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat jika $F_{hitung} < F_{tabel}$; signifikansi $> 0,05$. (Rahmawati & Illiyin, 2021).

Uji Koefisien Determininasi

Uji ini bertujuan untuk menghitung presentasi kontribusi variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik atau turunnya variabel dependen (Satria, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel. 4 Penghitungan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD (dalam triliun Rupiah)	Target PAD (dalam triliun rupiah)	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2011	17.82	16.28	109.49%	Sangat Efektif
2012	22.04	20.52	107.39%	Sangat Efektif
2013	26.85	26.30	102.08%	Sangat Efektif
2014	31.27	39.75	78.66%	Kurang Efektif
2015	33.68	37.96	88.72%	Kurang Efektif
2016	36.88	38.50	95.81%	Cukup Efektif
2017	43.90	41.68	105.31%	Sangat Efektif
2018	43.32	44.36	97.67%	Cukup Efektif
2019	45.70	50.84	89.89%	Kurang Efektif
2020	37.41	38.08	98.23%	Cukup Efektif
		Rata-Rata	97.33%	Cukup Efektif

Sumber : Hasil Penelitian, 2022
 (diolah Peneliti)

Berdasarkan penghitungan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD pada tahun 2011-2013, dan 2017 sudah sangat efektif dengan rasio diatas 100%, sedangkan pada tahun 2016, 2018,dan 2020 menunjukkan cukup efektif, tahun 2014,2015,dan 2019 menunjukkan kurang efektif. Rata-rata rasio efektivitas PAD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011-2018 sebesar 97.33% dengan kategori cukup efektif.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Tabel. 5 Penghitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (dalam triliun rupiah)	Realisasi Total Pendapatan Daerah (dalam triliun rupiah)	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
2011	26.42	28.29	93.37%	Kurang Efisien
2012	31.55	35.37	89.19%	Cukup Efisien
2013	38.30	39.51	96.92%	Kurang Efisien
2014	37.79	43.82	86.25%	Cukup Efisien
2015	42.66	44.20	96.49%	Kurang Efisien
2016	46.91	53.78	87.23%	Cukup Efisien
2017	50.72	64.82	78.24%	Efisien
2018	61.06	61.23	99.73%	Kurang Efisien
2019	64.09	62.30	102.88%	Tidak Efisien
2020	51.71	55.88	92.53%	Kurang Efisien
Rata-rata			92.28%	Kurang Efisien

Sumber : Hasil Penelitian, 2022
 (diolah Peneliti)

Berdasarkan penghitungan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja daerah pada tahun 2019 tidak efisien, sedangkan pada tahun 2011, 2013, 2015, 2018, dan 2020 kurang efisien, pada tahun 2012, 2014, dan 2016 menunjukkan cukup efisien, pada tahun 2014, 2015, dan 2019 menunjukkan kurang efektif. Pada tahun 2017 menunjukkan efisien. Rata-rata rasio efisiensi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011-2018 sebesar 92.28% dengan kategori kurang efisien.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel. 6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	6.73192091
	Absolute	.208
Most Extreme Differences	Positive	.185
	Negative	-.208
Kolmogorov-Smirnov Z		.659
Asymp. Sig. (2-tailed)		.778
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : SPSS, Hasil Penelitian, 2022
 (diolah Peneliti)

Berdasarkan Tabel 6 terlihat data berdistribusi normal karena hasil uji normalitas melalui Kolmogorov-Smirnov, koefisien & signifikan (Asymp.Sig) sebesar 0,778 yang artinya lebih besar dari taraf kesalahan sebesar 0,05.

Uji Multikolinieritas

Tabel. 7 Hasil Uji Multikolinieritas

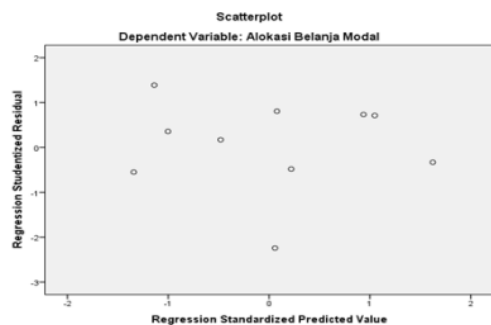
Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error				
(Constant)	21.040	45.199		.466	.656	
Efektivitas PAD	.069	.271	.084	.220	.832	.974
Efisiensi Belanja Daerah	-.049	.364	-.063	-.138	.894	.974

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

Sumber : SPSS, Hasil Penelitian, 2022

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 7 diperoleh bahwa hasil nilai VIF 1.026 untuk variabel efektivitas PAD dan efisiensi belanja daerah yang artinya dibawah 10.00 batas toleransi multikolinieritas sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi Gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar. 2 Hasil Uji

Heteroskedastisitas, 2022 (diolah Peneliti)

Berdasarkan Gambar 2, data dalam penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas karena terlihat-titik-titik menyebar-tidak beraturan serta tidak membentuk-pola tertentu.

Uji Autokorelasi

Tabel. 8 Hasil Uji Autokorelasiv

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.455 ^a	.207	-.057	4.34572	1.437

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : SPSS, Hasil Penelitian, 2022 (diolah Peneliti)

Berdasarkan Tabel 8 diatas, diketahui nilai Durbin Watson (d) sebesar 1.437. Dengan melihat tabell Durbin Watson pada signifikansi sebesar 5% dengan variabel independen 2 dan sampel 10 maka didapatkan hasil dL sebesar 0.6972 dan dU sebesar 1.641. Nilai $4-1.437 > 0.6972 < 1.437$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Maka dapat disimpulkan, dari hasil uji diatas diperoleh data penelitian

telah memenuhi uji prasyarat asumsi klasik.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel. 9 Hasil Uji Regresif Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-9.578	5.379		-1.781	.125
1 Efektivitas PAD	-.087	.115	-.277	-.757	.478
Efisiensi Belanja Daerah	.106	.116	.334	.915	.395

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

Sumber : SPSS, Hasil Penelitian, 2022 (diolah Peneliti)

Berdasarkan Tabel 9 diatas, menunjukkan hasil uji regresi berganda antara Rasio Efektivitas PAD (X1) dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah (X2) terhadap Alokasi Belanja Modal (Y) diketahui nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel independen sebesar -0.087 dan 0.106 sedangkan nilai konstanta sebesar -9.578. Sehingga diperoleh persamaan regresi yaitu $Y = -9.578 - 0.087X_1 + 0.106X_2$. Dimana Y adalah alokasi belanja modal. Dari persamaan tersebut bisa diartikan bahwa nilai -9.578 menunjukkan bahwa jika tidak ada X1 dan X2 maka alokasi belanja modal bernilai -9.578. Nilai koefisien -0.087 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lain bersifat tetap dan rasio efektivitas PAD (X1) mengalami kenaikan sebesar 1% maka alokasi belanja modal berkurang sebesar 0.087. Nilai koefisien 0.106 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lain bersifat tetap dan rasio efisiensi

belanja daerah (X2) mengalami kenaikan sebesar, 1% maka alokasi belanja modal bertambah sebesar 0.106.

Uji Hipotesiss

Uji T

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa nilai signifikansi rasio efektivitas PAD sebesar sebesar 0.478 yang berarti lebih besar dari 0.05 dan uji t hitung sebesar -.757 lebih kecil dari t tabel sebesar 2.364. Sehingga bisa disimpulkan bahwa rasio efektivitas PAD (X1) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Y).

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa nilai signifikansi rasio efisiensi belanja daerah sebesar sebesar 0.395 yang berarti lebih besar dari 0.05 dan uji t hitung sebesar 0.915 lebih kecil dari t tabel sebesar 2.364. Sehingga bisa disimpulkan bahwa rasio efisiensi belanja daerah (X2) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Y).

Uji F Simultan

Tabel. 10 Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	29.609	2	14.805	.784	.498 ^b
Residual	113.312	6	18.885		
Total	142.921	8			

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja Modal

Sumber : SPSS, Hasil Penelitian, 2022
 (diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.498 yang berarti lebih lebih besar dari 0.05 dan uji f hitung sebesar 0.784 lebih kecil dari

f tabel sebesar 4.07, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah yang terdiri atas rasio efektivitas PAD (X1) dan rasio efisiensi belanja daerah (X2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Y).

Pembahasan

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji regresi linear berganda menyatakan bahwa H1 ditolak dengan nilai signifikansi 0.478 lebih besar dari 0.05 artinya tidak terdapat pengaruh antara rasio efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmatusti,dkk,2022) di Kabupaten /Kota Jawa Timur dan (Andriyani n et all, 2020) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang juga mengatakan bahwa rasio efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Rasio efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari postur PAD yang masih ada beberapa tahun dari periode tahun 2011-2020 yang belum mencapai target anggaran yang ditentukan, nilai efektivitas PAD di Provinsi DKI Jakarta maish memiliki hasil yang cukup efektif yaitu dengan rata-rata 97,33%. Rasio alokasi belanja modal yang masih rendah dengan rata-rata

19.91% di pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diartikan bahwa pemerintah daerah masih belum maksimal mengalokasikan pendapatan mereka untuk belanja modal yang diperuntukkan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan bisa melakukan evaluasi terhadap jenis dan jumlah belanja yang seharusnya dialokasikan agar alokasi belanja daerah terkhusus belanja modal bisa terlaksana dengan efektif sehingga pelayanan dan fasilitas publik dapat ditingkatkan.

Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji regresi linear berganda menyatakan bahwa H_2 ditolak dengan nilai signifikansi 0.395 lebih besar dari 0.05 artinya tidak terdapat pengaruh antara rasio efisiensi belanja daerah terhadap alokasi belanja modal di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lufki (2013) yang menyatakan juga bahwa efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Rasio efisiensi belanja daerah terhadap alokasi belanja modal di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari postur belanja daerah masih memiliki hasil yang kurang efisien yaitu dengan rata-rata 92,28%. Pemanfaatan dana daerah yang tidak efisien yang ditunjukkan oleh angka rasio yang tinggi dapat disebabkan karena jumlah realisasi pengeluaran lebih besar

daripada jumlah penerimaan, sehingga terjadi pemborosan untuk belanja daerah tetapi tidak dialokasikan secara maksimal untuk belanja modal. Hasil tersebut mengindikasikan pemerintah daerah belum menganggap belanja modal sebagai hal penting bagi kemajuan daerah dan memilih untuk mengalokasikan anggaran ke jenis belanja lain.

Pengaruh Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji regresi linier berganda, menyatakan bahwa H_3 ditolak yang artinya tidak berpengaruh secara simultan antara dua rasio kinerja keuangan yaitu rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut diketahui dengan pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan $f_{hitung} < f_{Tabel}$ ($0.748 < 4.07$) dan nilai signifikansi > 0.05 ($0.498 > 0.05$).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mulyani (2017) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan dalam rasio efektivitas PAD dan efisiensi belanja daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Perbedaan hasil penelitian tersebut dikarenakan mungkin terdapat perbedaan dari jumlah sampel yang digunakan sehingga penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda.

Penelitian Mulyani (2017) menggunakan sampel Laporan Keuangan dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan periode dari tahun 2013-2015 sedangkan penelitian ini hanya menggunakan Laporan Keuangan Provinsi saja dengan periode dari 2011-2020. Mungkin dapat dikatakan bahwa teori yang digunakan hanya bisa dibuktikan oleh sampel data yang lebih besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah dalam rasio efektivitas dan rasio efisiensi belanja daerah baik secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2020.

DAFTAR PUSTAKA

abdullah, syukriy. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. SSRN Electronic Journal, (August 2008).
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1709142>
 Ayuwardani, R. P., & Isroah, I. (2018). Pengaruh Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial PUBLIC OFFERING (Studi Empiris Perusahaan Go

Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7(1).
<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19781>

Elfreda Aplonia Lau, Syahriandi, L. R. J. (2016). Efektivitas Dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kutai Timur. *Ekonomia*, 5(1), 462–470.

Engkus. (2018). Perspektif Administrasi Pembangunan: Menuju Ke Arah Konvergentif. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.

Engkus, E. (2013). Desentralisasi (Teori yang Baik Dengan Praktek yang buruk (pp. 1–16). pp. 1–16.

Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*.
<https://doi.org/10.15575/jpan.v1i1i2.7644>

Fathiyah. (2012). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Universitas Batang*, 10(9), 32. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/225527-analisis-efisiensi-belanja-daerah-pemeri-6d744d52.pdf>

Hidayat, M. F. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten

- dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 1(2), 1–19. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/580>
- Laksmi, S., & Supadmi, N. (2014). Efektivitas Pemungutan Pad Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 515–524.
- Lempoy, O. (2020). Analisis Perbandingan Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Periode 2011-2014 Dan Periode 2016-2019. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 895–902. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31168>
- Lubis, P. K. D. . N. H. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013. *Journal Kitabah*, 1(1), 23. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/815>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga :
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga (3rd ed.)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyani, D. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013-2015 (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat). *Universitas Pendidikan Indonesia*, 6–18.
- Nuri Andriyani, Mukhzarudfa, & Enggar Diah PA. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(2), 132–144. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263>
- Rahmawati, I., & Illiyin, R. (2021). Pengaruh Motivasi, Persepsi Dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Hp Oppo. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 10(1), 103–112. Retrieved from <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/728>
- RISWAN, R., & Affandi, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2). <https://doi.org/10.36448/jak.v5i2.545>
- Satria, M. R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Psnt Batan Bandung. *Land Journal*, 1(2), 159–166. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.708>
- Siregar, A. O. D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa

- Barat). *Journal IMAGE* |, 9(1), 1–19.
- Syuhabudin, N. (2021). Mudharabah-Musyarakah dan peningkatan penghasilan masyarakat pesisir (Ma'zumi, Ed.). Indonesian: Media Sains Indonesia. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Mudharabah_Musyarakah_dan_peningkatan_pe/AoNTEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1
- Wahyuddin, W., & Sugianal, N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.29103/jak.v5i1.1813>
- Yulientinah, D. S., & Nur, A. M. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dibadan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bpkd) Kabupaten/Kota Bulukumba. *Land Journal*, 2(2), 15–29. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1344>